

## ABSTRAK

Penelitian mengenai kualitas audit lembaga pemerintahan telah banyak dilaksanakan. Salah satunya adalah penelitian Favere-Marchesi (2000:121) yang mengatakan bahwa regulasi yang mengatur independensi auditor dari *auditee* dan akuntabilitas auditor pada *stakeholder*-nya di sektor pemerintahan dapat mempengaruhi kualitas audit yang diberikan oleh lembaga audit negara. Berdasarkan penelitian-penelitian tersebut, peneliti ingin mengulas faktor penentu kualitas audit dari perspektif Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) di mana BPK RI merupakan lembaga audit pemerintahan tertinggi yang dimiliki oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia (UUD 1945 pasal 23E ayat 1). Peneliti ingin memahami bagaimana faktor-faktor penentu yaitu faktor kewenangan dari lembaga legislatif yang berkaitan dengan audit; faktor pendanaan; faktor pengawasan; faktor mandat; serta faktor independensi terhadap arahan lembaga legislatif dan eksekutif dapat menjadi sebagai atribut-atribut yang mampu meningkatkan kualitas audit dari BPK RI. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus dengan menggunakan kerangka kinerja dari English dan Guthrie (2000:101). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas audit BPK RI belum memadai ditinjau dari faktor kewenangan lembaga legislatif dan faktor independensi terhadap arahan lembaga legislatif dan eksekutif. Oleh karena itu, regulasi pelaksanaan audit atau peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang BPK RI perlu diamandemen untuk mewujudkan kualitas audit yang memadai.

Kata kunci: Akuntabilitas, BPK RI, Faktor-Faktor Penentu Kualitas Kudit, Independensi, Mandat, Parlemen, Pendanaan, Pengawasan, Regulasi Pelaksanaan Audit

**ABSTRACT**

*Research on audit quality government institutions have been widely implemented. One is research Favere-Marchesi (2000: 121) who says that the regulations governing auditor independence from the auditee and the auditor's accountability to its stakeholders in the government sector may affect audit quality provided by the state audit agency. Based on these studies, the researchers want to review the determinants of audit quality from the perspective of the Audit Board of the Republic of Indonesia (BPK RI) where BPK RI is a Supreme Audit Institution owned by the government of the Republic of Indonesia (23E Article 1945, paragraph 1). Researchers want to understand how the determinants of the authority of the legislature of factors relating to the audit; funding factors; factor oversight; factors mandate; and factor independence against the direction of the legislature and the executive could be as attributes that can improve the quality of BPK audit. This study uses descriptive qualitative case study approach using the framework of performance of English and Guthrie (2000: 101). The results showed that the BPK audit quality is not adequate in terms of the authority of the legislature of factors and factor independence against the direction of the legislature and the executive. Therefore, enabling legislation or legislation governing BPK needs to be amended to achieve adequate quality audit*

*Keywords: Independence, Accountability, Enabling Legislation, Funding, Oversight, Mandate, Parliament, BPK RI, Determinants of Audit Quality*